

ISLAMISME DAN POLITISASI AGAMA MODEL PKS DALAM PILPRES 2009

*Akh. Muzakki**

Abstract: *In the past decade or so, Islamism as a political concept and perhaps as an ideology has gained strong momentum in Indonesia. The fall of Soeharto after more than three decades in power has helped this ideology to emerge and exert itself particularly in the form of religion-oriented political party. This paper is interested in exploring the expression and actualization of Islamism by scrutinizing the political behavior of Justice and Welfare Party (Partai Keadilan Sejahtera / PKS) during the 2009 presidential election. We are particularly interested in looking at the use of religious symbols and rites by the party for clear political purposes. We argue that Islamism has been manipulated by PKS during that election as a vehicle to gain power. Hence, the main problem that this paper deals with is actually the idea of the politization of religion by a political party claiming to have represented Islam and its noble teaching.*

Keywords: *Islamism, religious symbols and rites, PKS*

Pendahuluan

Banyak orang yang membedakan secara tajam antara NU, Muhammadiyah dan PKS. NU umpamanya lebih dikenal “ramah” dengan khazanah kultural masyarakat sekitar karena basis massa utamanya orang pinggiran atau kampung serta ideologinya yang lebih lentur dan akulturatif dengan tradisi lokal. Muhammadiyah, dengan kecenderungan ideologi purifikasinya lebih kritis terhadap budaya lokal. Bedug yang dalam tradisi NU digunakan sebagai media untuk menandai datangnya waktu shalat cenderung dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bentuk inovasi (*bid’ah*) yang tidak ada referensi legalnya dalam Islam. Karena itu, Muhammadiyah cenderung menjauhi pemakaian Bedug sebagai bagian dari tradisi keagamaannya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung lebih purifikatif dengan ideologi Islamisme yang dikembangkan daripada Muhammadiyah. Masjid merupakan salah satu “institusi keagamaan” yang kerap dipakai sebagai pusat gerakan dakwah. Karena ia datang jauh lebih belakangan dibanding Muhammadiyah dan NU, maka pergerakan PKS yang menjadikan masjid sebagai episentrum gerakan dakwahnya harus bersinggungan dengan kelompok lain. Karena aktivitasnya yang tinggi dan intens, tidak jarang masjid yang semula berada dalam pengasuhan dan pengelolaan kelompok Muslim lain, seperti Muhammadiyah dan NU, lalu “berpindah tangan” ke dalam pengelolaan aktivis PKS.

Di sela-sela hiruk-pikuk Pemilu 2009, polarisasi itu didengungkan oleh sebuah buku berjudul *Ilusi Negara Islam*¹ hasil kerjasama The Wahid Institute, Maarif Institute, dan Gerakan Bhinneka Tunggal Ika yang diluncurkan pada April 2009. Kehebohan pun tidak bisa dihindarkan, tidak saja dalam bentuk diskusi sengit yang mengemuka, namun juga dalam bentuk yang lebih fisik. Toko-toko buku yang menjual buku *Ilusi Negara Islam* kabarnya

*Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

¹ Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Maarif, 2009).

diteror. Mereka diberitakan diancam melalui telepon-telepon tidak dikenal dengan berbagai bentuk tindakan, mulai dari penyerbuan hingga pembakaran. Meskipun ancaman yang demikian sempat dibantah oleh sejumlah manajer toko buku,² kehebohan tetap meluncur kencang.

Tulisan ini tidak membahas secara spesifik buku di atas, sebagaimana juga tidak membahas persetujuan antara NU, Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tulisan ini justru ingin mendiskusikan ekspresi dan aktualisasi dari kecenderungan Islamisme yang berlaku dan dipraktekkan oleh PKS.³ Islamisme yang dimaksud di sini adalah kecenderungan untuk menjadikan Islam sebagai basis ideologis bagi upaya untuk mengkonstruksi dan menerjemahkan politik kepartaian. Kasus yang ingin dilihat adalah ekspresi politik PKS dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pilpres) 2009.

Tulisan ini berargumentasi bahwa dalam mengikuti kontestasi Pilpres 2009, kecenderungan ideologi Islamisme yang dikembangkan oleh PKS diaktualisasikan melalui pola politisasi simbol dan ritual agama. Politisasi simbol agama ini dilakukan oleh PKS dalam dua arus yang berbeda namun bertujuan sama. Kedua arus dimaksud mewujudkan ke dalam bentuk penebaran peringatan (*warning*) bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung dan penangkalan atas "serangan politik" dari kekuatan politik lain dengan menggiring calon yang didukung kepada ritual Islam. Kedua bentuk politisasi tersebut dilakukan dalam satu tarikan nafas dan semangat yang sama, sebagaimana "dua sisi mata uang". Konkretnya, keduanya bergerak dalam kerangka "Islamisasi" personal untuk menaikkan citra politik pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai figur Muslim yang taat. Ujungnya, strategi politisasi tersebut dilakukan oleh PKS untuk memperkuat tingkat elektabilitas calon pasangan yang didukung melalui koalisi politik dengan partai-partai lainnya serta meningkatkan daya tawar politik PKS itu sendiri terhadap partai anggota koalisi lainnya.

Dari Islamisasi Kampus ke Islamisasi Negara

Dalam visi umumnya, PKS menahbiskan dirinya "sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa."⁴ Ada dua kata kunci penting yang diusung oleh PKS dalam visi umumnya ini, yakni kata "ummat" dan "bangsa". Kedua kata ini menjadi konsep dasar yang ingin dikembangkan oleh PKS dalam implementasi politiknya. Secara kategoris, dengan penyebutan dua kata berbeda makna dalam kalimat visi umumnya tersebut, PKS tampak ingin membedakan antara konsep "ummat" dan konsep "bangsa". Kata dan konsep "ummat" disebut secara spesifik dalam visi umum tersebut untuk menunjuk kepada kelompok masyarakat Muslim, sedangkan kata

² Gramedia, sebagai misal, membantah adanya ancaman penyerbuan dan pembakaran terkait dengan rencana penjualan buku dimaksud. Lihat "Ilusi Negara Islam' Diperdebatkan, Gramedia Bantah Diancam," *Tempointeraktif*, 19 Mei 2009: http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2009/05/19/brk_20090519-177189.id.html (Diakses 19 Mei 2009).

³ Lebih lanjut mengenai ideologi Islamisme PKS, lihat Ahmad-Norma Permata, "Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia, 1998-2006" (Disertasi PhD, Graduate School of Politics, the University of Münster, Germany, 2008).

⁴ Lihat "Visi dan Misi," website PKS: <http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=110> (Diakses 1 Juli 2009).

dan konsep “bangsa” menunjuk kepada makna lebih luas dari gugusan kebangsaan Indonesia. Karena itu, PKS mendedikasikan diri sebagai politik keummatan dalam satu sisi dan politik kebangsaan di sisi lain.

Dalam pengembangan lebih jauh dari visi umum di atas, PKS menyebut dirinya sebagai “partai da’wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”⁵ Konsepsi ideologi politik yang demikian ini menunjuk kepada prinsip dan semangat Islamisme. Seperti disinggung di atas, Islamisme bertumpu pada prinsip dan semangat untuk menjadikan Islam sebagai basis ideologis untuk mengemas dan mengejawantahkan kepentingan politiknya dalam relasinya dengan kuasa politik negara.⁶ Orientasi kuasa politik negara menjadi elemen yang kuat dari pergerakan Islamisme itu sendiri.

Hanya saja, Islamisme dalam pemahaman PKS masih memberi ruang bagi terjadinya dialog dengan model negara dan dasar ideologi Indonesia. Pemberian ruang dialog ini memunculkan sikap yang cenderung akomodatif daripada konfrontatif. Firman Noor menyebut penerjemahan Islamisme seperti ini membuat PKS berbeda dari kelompok fundamentalis lainnya, seperti Front Pembela Islam (FPI),⁷ Laskar Jihad (LJ),⁸ ataupun Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).⁹ Dia menyebut PKS sebagai fundamentalisme Islam moderat. Kasus yang dilihat adalah respon PKS terhadap tiga isu utama: hubungan agama dan negara, pelaksanaan syariat Islam, negara Islam dan demokrasi. PKS, menurut Noor, cenderung setuju dengan ideologi negara Pancasila dan konsep negara-bangsa meskipun meyakini kedua konsep ideologis ini bukan merupakan sesuatu yang final.¹⁰ Ketidakfinalan ini membuka ruang bagi masuknya Islam sebagai basis ideologi dalam praktik Islamisme PKS.

Konsepsi ideologi politik seperti dimaksud bertemu dalam satu titik dengan pembedaan anggitan antara “ummat” dan “bangsa” di atas. PKS tampak ingin memberikan penekanan bahwa di tengah permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, masih terdapat gugusan masyarakat Muslim (yang disimbolisasikan dengan anggitan “ummat”) yang diandaikan mampu memberikan solusi dan bukan menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri. Penawaran Islam sebagai basis ideologi melalui Islamismenya dilakukan dalam kerangka peletakan ummat ke pusat pergerakan politik bangsa Indonesia, dan bukan sebaliknya, ke pinggir arena kontestasi politik sebagai penonton. Oleh karena itu, berpolitik kepartaian dianggap oleh PKS, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang elitnya, Mutammimul Ula, sebagai “mimbar dakwah di parlemen”, atau bahkan lebih luas lagi sebagai “jihad siyasi” (jihad politik).¹¹

⁵ “Visi dan Misi.”

⁶ Anthony Bubalo dan Greg Fealy, *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia* (Sydney: Lowy Institute, 2005); RE Elson, “Islam, Islamism, the Nation, and the Early Indonesian Nationalist Movement,” *Journal of Indonesian Islam*, vol. 01, no. 02 (Desember 2007), 231-266.

⁷ Lebih jauh tentang FPI, lihat Jajang Jahroni, *Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam, 1998-2003* (Washington: University of Washington Press, 2008).

⁸ Lebih jauh tentang LJ, lihat Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 2006).

⁹ Penjelasan lebih detail tentang basis ideologis MMI bisa dijumpai di Irfan S. Awwas (ed.), *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001).

¹⁰ Firman Noor, “Moderate Islamic Fundamentalism: Understanding the Political Thinking of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” *Studia Islamika*, Vol. 14, No. 3 (2007), 447-481.

¹¹ Seperti dikutip oleh Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi* (Bandung: Haraktuna Publishing, 2005), 31.

Sebagai partai dakwah sebagaimana yang bisa dibaca dari klaim politiknya di atas, PKS membangun strategi rekrutmen dan kaderisasi yang memiliki kekhasan tersendiri dibanding partai lain. Model rekrutmen dan kaderisasi terstruktur dan bersifat rutin. Sebagai implementasi dari strategi itu, sayap dakwah digunakan secara maksimal untuk melakukan penguatan tidak saja personal anggota tetapi juga pada ujungnya adalah institusi. Strategi dakwah ini dilakukan melalui forum-forum seperti *liqa'* (pertemuan yang dikemas dalam bentuk pengajian majelis ta'lim) dan "mabit" (kependekan dari "malam bina iman dan taqwa" yang diselenggarakan sebagai majelis ta'lim dari masjid ke masjid) yang berskala mingguan maupun kajian Islam intensif yang berskala bulanan.

Dengan pertemuan model pengajian majelis ta'lim di atas, PKS akan dengan mudah untuk menangkal semua tuduhan bahwa ia telah melakukan kampanye politik sepanjang lima tahun masa kekuasaan politik di Indonesia. Pasalnya, sayap yang digunakan oleh PKS adalah sayap dakwah. Namun, demikian, sayap dakwah ini dipakai tidak saja sebagai media untuk melakukan "Islamisasi" pada level bawah dari masyarakat, akan tetapi juga sebagai strategi untuk konsolidasi politik. Jati diri PKS sebagai sebuah partai tidak bisa membebaskan diri dari pergerakan politik, meskipun dakwah diklaim sebagai semangat pergerakannya.

Melalui pertemuan-pertemuan mingguan yang dikemas dalam bentuk pengajian majelis ta'lim itu, PKS bisa disebut sebagai satu-satunya partai yang mesin politiknya selalu hangat sepanjang lima tahun masa kekuasaan politik di negeri ini. Kalau mesin politik partai-partai lainnya bergerak antara dingin, hangat dan panas seiring dengan momen perhelatan dan pertarungan kuasa politik, mesin politik PKS selalu hangat dan akan semakin memanas menjelang setiap kontestasi politik. Dengan karakter model konsolidasi yang demikian, mobilisasi massa internal, khususnya untuk kepentingan pemenangan kontestasi kuasa politik, akan dengan mudah dilakukan.

Pada awal perkembangannya, PKS tidak bisa dipisahkan dari pergerakan sebuah kelompok yang lebih dikenal dengan Jamaah Tarbiyah. Kelompok ini tumbuh sejak pertengahan 1980an, dan mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak awal 1990an di kampus-kampus umum. Yon Mahmudi, seorang deklarator PKS dan penulis disertasi tentang perkembangan PKS dan Jamaah Tarbiyah untuk studi doktoralnya di The Australian National University (ANU), menyebut Jamaah Tarbiyah sebagai kelompok "santri baru nan global" (*new-cum-global santri*). Mereka bukan berasal dari kelompok atau keluarga abangan dan bukan pula sekular. Namun demikian, mereka bergerak sangat aktif dalam melakukan gerakan dakwah di kampus-kampus umum.¹²

Sejak awal 1990an, mereka mulai menguasai organisasi-organisasi intra kampus. Segera, mereka membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) dan setelah berhasil menguasai organisasi mahasiswa intra kampus, mereka pun membentuk sayap organisasi ekstra kampus yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Pergerakan dari kekuatan sayap intra dan ekstra kampus inilah yang kemudian menggerakkan Jamaah Tarbiyah menjadi sebuah partai politik pada tahun 1998 dengan nama Partai Keadilan (PK).¹³ Karena dalam Pemilu 1999 tidak lolos ambang batas *electoral*

¹² Yon Machmudi, "The Emergence of New Santri in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam*, vol. 02, no. 01 (Juni 2008), 93-95.

¹³ Machmudi, "The Emergence of New Santri," 95-96.

threshold, PK bermetamorfosis menjadi PKS sejak momen Pemilu 2004 hingga saat ini.

Melihat perkembangan awal di atas, tidak salah jika disebut bahwa strategi yang sangat populer di lingkungan PKS adalah “dari Islamisasi Kampus ke Islamisasi negara”.¹⁴ Namun, perkembangan terakhir dari pergerakan PKS melalui sayap Jamaah Tarbiyahnya mengharuskan ilustrasi atas strategi tersebut digeser untuk diperluas. Pasalnya, pergerakan PKS kini tidak lagi bertumpu pada dunia Kampus, akan tetapi meluas hingga menyentuh lapisan terbawah masyarakat. Masjid adalah institusi keagamaan yang kerap dijadikan sebagai pintu masuk dan sekaligus pusat bagi kegiatan “dakwah-cum-politik” aktivis PKS.

Pergeseran melebar di atas diperkuat oleh konsep “orbit dakwah” (*mihwar al-da`wah*) yang menjadi falsafah dasar pergerakan PKS. Konsep ini menjelaskan bahwa gerakan dakwah PKS dilakukan dengan meliputi tiga fase utama: fase orbit konsolidasi internal (*mihwar tanzimi*), fase orbit masyarakat (*mihwar al-sha`b*), dan fase orbit pelembagaan (*mihwar mu`assasi*). Fase orbit pertama menunjuk kepada proses pembinaan kader, sedangkan fase kedua merujuk kepada pengembangan orientasi dakwah ke masyarakat lebih luas melalui semangat pelayanan. Fase orbit ketiga berkonsentrasi pada proses pelembagaan dakwah dengan melakukan penetrasi ke dalam lembaga-lembaga publik untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik. Pada fase ketiga ini, dikembangkan dua kategori dakwah, yakni dakwah parlementer dan dakwah birokrasi.¹⁵

Tidak jarang, pergerakan melebar PKS ini harus bersinggungan dengan kelompok-kelompok Muslim lainnya di Indonesia, seperti disinyalir di atas. Muhammadiyah kerap menjadi pihak yang merasa paling “dirugikan” oleh pergerakan melebar PKS ini karena ada sejumlah masjid yang selama ini menjadi “asuhan” dan juga “kepemilikan” Muhammadiyah diklaim oleh Muhammadiyah telah “berpindah tangan” ke PKS menyusul aktifnya kader-kader PKS untuk mengaktifkan masjid. Karena itu, bukan sesuatu yang mengherankan jika Muhammadiyah pun pada akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) No. 149/Kep/I.0/B/2006. Isinya tentang penyelamatan Persyarikatan Muhammadiyah dari infiltrasi partai-partai politik seperti PKS.¹⁶

Kini persinggungan dan bahkan pergesekan antara PKS dengan kelompok-kelompok Islam lainnya, seperti Muhammadiyah dan NU menjadi catatan yang mengiringi pergerakan melebar PKS di basis terbawah masyarakat. Kampus, meskipun masih tetap menjadi basis yang kuat, kini tidak lagi menjadi konsentrasi tunggal dari strategi pergerakan PKS. Hal ini tampak dilakukan oleh PKS untuk memperluas ceruk pasar (*captive market*) politik PKS di tengah pasar politik Muslim yang sangat luas dan heterogen di Indonesia.

PKS memang memiliki kedekatan politik dengan tokoh-tokoh eks-Masyumi. Banyak figur penting di tubuh PKS yang dulunya dibesarkan dalam lingkungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) atau eks-Masyumi. Hidayah Nur Wahid, mantan Preisdan PKS dan juga Ketua MPR RI (2004-2009), adalah salah satu contohnya. Namun demikian, dari

¹⁴ Lihat Yon Machmudi, *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party* (Canberra: ANU Press, 2008), khususnya 107-131; Permata, “Islamist Party and Democratic Participation,” 84-122.

¹⁵ Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, cetakan 1 (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat PK S, 2008), 50-56.

¹⁶ Isi utuh dari SKPP Muhammadiyah ini bisa dijumpai di Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam*, bagian “lampiran” 240-249.

sisi strategi perjuangan, PKS tampak lebih maju dibanding tokoh eks-Masyumi di DDII. Sebab, mereka tidak saja melakukan “politik melalui jalur dakwah” sebagaimana yang menjadi khazanah perjuangan tokoh-tokoh eks-Masyumi di DDII,¹⁷ akan tetapi juga melakukan “dakwah melalui jalur politik partai”.¹⁸

Jatuhnya rezim otoritarian Soeharto menjadi konteks sosial-politik di balik menguatnya kecenderungan dakwah melalui jalur politik partai oleh PKS. Represi politik kini tampak semakin mengecil, sehingga aktivitas *harakah* dan dakwah menemukan momentumnya untuk berkembang lebih leluasa. Politik merupakan saluran yang sangat terbuka bagi pergerakan dakwah secara lebih terinstitusional melalui partai. Munculnya PKS dengan strategi dakwahnya melalui jalur partai politik sangat difasilitasi oleh terbukanya ruang gerak dakwah di negeri ini pasca jatuhnya rezim Soeharto. Berkiprahnya PKS hingga pada Pilpres 2009 menjadi penanda semakin terbukanya ruang politik bagi aktivis dakwah.

PKS dan Koalisi Cikeas: Pandangan Sekilas

Hasil akhir Pemilu legislatif 2009 menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 202 dan 203 (menyangkut penetapan perolehan suara) dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, hanya 9 partai politik yang lolos dari ambang batas *parliamentary threshold* sebanyak 2,5 persen, dan berhak mendudukkan kadernya di DPR RI. Kesembilan partai politik itu adalah PD, PDI-P, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Partai Hanura.

Kalau meminjam bahasa sepak bola, tampak bahwa komposisi papan atas dari klasemen perolehan suara Pemilu legislatif 2009 dihuni oleh 3 partai nasionalis: PD, Partai Golkar, dan PDIP. Partai-partai Islam, baik dalam pengertian asas maupun basis massa, yang tergolong besar menghuni papan tengah. Mereka menduduki urutan ke-4 hingga ke-7. PKS, sebagai misal, menempati urutan ke-4, dan kemudian diikuti secara berturut-turut oleh PAN, PPP, dan PKB. Papan bawah dari 9 besar klasemen di atas dihuni oleh dua pendatang baru dalam Pemilu 2009 ini, yakni Gerindra dan Hanura.

Satu catatan menarik dari perolehan suara 9 partai di atas bisa diberikan kepada PKS. Partai ini adalah satu-satunya partai Islam yang selalu menunjukkan grafik prestasinya yang cenderung meningkat dalam sejarahnya selama mengikuti kontestasi politik nasional sejak 1999. Pada Pemilu 1999, PKS (saat itu bernama PK) hanya meraih 1,4 persen suara. Pada Pemilu 2004, PKS mampu meraih lonjakan suara yang signifikan hingga mencapai 7,3 persen. Pada Pemilu 2009, raihan suara PKS meningkat kembali meskipun tidak signifikan Pemilu 2004, yakni dengan mencapai 7,88 persen.

Pada Pemilu 2009, secara komparatif, tampak bahwa di tengah merosotnya perolehan suara partai-partai Islam lainnya, PKS justru membubuhkan perolehan suara yang meningkat dibanding pada Pemilu 2004. Meskipun demikian, raihan suara pada Pemilu 2009 ini harus

¹⁷ Lebih jauh mengenai pergerakan DDII, lihat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *Khittah Da'wah* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2001). Lihat juga Asna Husin, “Philosophical and Sociological Aspects of *Da'wah*: A Study of Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia” (Disertasi PhD, Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University, 1998).

¹⁸ Lydia Trotter, “Islam, Women and Indonesian Politics: The PKS challenge to Substantive Theories of Democracy” (Tesis Honours, Department of Indonesian Studies, The University of Sydney, Australia, 2006), 11-14; Permata, “Islamist Party and Democratic Participation,” 195-229; Machmudi, *Islamising Indonesia*, 191-215.

mengubur untuk sementara ambisi politik PKS yang dicanangkan sebelumnya bahwa PKS akan mencalonkan kadernya sebagai presiden. Pasalnya, pasal 9 dari Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempersyaratkan bahwa partai yang memiliki hak untuk mengajukan calonnya dalam Pilpres adalah yang perolehan kursi DPR-nya mencapai minimal 20 persen atau 25 persen dari suara nasional dalam Pemilu legislatif.

Sebagai konsekuensi perolehan suara nasional yang kurang dari 25 persen atau perolehan kursi di DPR yang kurang dari 20 persen, PKS harus melakukan koalisi dengan partai politik lainnya untuk bisa mengusung calon yang diinginkan untuk duduk sebagai capres atau cawapres. Muncullah kesepakatan-kesepakatan politik awal antara PKS dan Partai Demokrat, di antaranya adalah mengusung nama Hidayat Nur Wahid dan Tifatul Sembiring untuk disandingkan dengan SBY sebagai cawapresnya. Bersama sejumlah partai lainnya, terutama PKB, PPP dan PAN, kesepakatan-kesepakatan awal itu akhirnya dikonkretkan ke dalam sebuah koalisi yang lebih dikenal dengan "Koalisi Cikeas", sebuah nama yang menunjuk kepada kediaman SBY di Bogor.

Proses penggabungan diri ke dalam koalisi SBY ini dilakukan dengan strategi berliku. Seperti diuraikan sebelumnya, awalnya PKS menyodorkan nama Hidayat Nur Wahid bersama Tifatul Sembiring sebagai figur yang ditawarkan kepada SBY. Pada saat yang sama, partai-partai anggota koalisi juga menyodorkan nama calon masing-masing untuk ditawarkan kepada SBY sebagai cawapresnya. PAN, sebagai misal, menyodorkan nama kadernya, Hatta Rajasa, yang dalam pemerintahan SBY-Jusuf Kalla (2002-2009) pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan selanjutnya Menteri Sekretaris Negara. PKB juga menyodorkan nama ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai calon pendamping SBY.

Sebagai partai peserta koalisi dengan perolehan suara terbanyak setelah Partai Demokrat, PKS merasa bahwa calon yang diusungnya paling laik untuk dipilih oleh SBY sebagai pendampingnya. Perolehan suara yang tertinggi kedua pada anggota koalisi ini memperkuat rasa optimisme politik pada diri PKS untuk menaikkan daya tawar kepada SBY dan Partai Demokrat. Selain itu, figur Hidayat Nur Wahid, khususnya, dianggap memiliki rekam jejak personal yang baik selama menjadi pejabat negara. Posisinya selaku ketua MPR RI untuk periode 2004-2009 juga dianggap mempunyai daya tarik tersendiri bagi publik, sehingga diyakini akan menyumbang suara yang cukup signifikan bagi kemenangan SBY.

Namun, saat SBY menjatuhkan pilihan pada Boediono yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sebagai cawapresnya, optimisme politik PKS itu berubah menjadi "kemurungan politik". Setelah jelas calon yang diusung ternyata tidak dipilih oleh SBY, manuver politik pun dilakukan. Untuk tetap menaikkan daya tawar politik ke SBY dan Partai Demokrat, PKS mendatangi partai-partai besar lainnya untuk menarik perhatian SBY dan Partai Demokrat. Safari politik pun dilakukan oleh PKS dengan mengirim utusan dari Tim 5 ke partai besar lainnya, PDIP dan Golkar. Anggota Tim 5 PKS sendiri terdiri dari Presiden PKS, Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mahfudz Siddiq, Ketua Dewan Syariah PKS Surachman Hidayat, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Suharna Surapranata, dan anggota Fraksi PKS DPR RI Suropto.

Safari politik ini tidak lain hanya untuk menarik perhatian SBY dan Partai Demokrat. Pasalnya, PKS juga menyadari fakta bahwa koalisi politik telah hampir rampung dilakukan

baik oleh PDIP maupun Golkar bersama parti-partai lainnya yang sudah mengikat kesepakatan awal dengan masing-masing dari keduanya. PDIP saat itu hampir final untuk memasang Megawati Sukarnoputri dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra sebagai pasangan capres-cawapres. Hal yang sama juga terjadi pada Golkar. Partai yang saat itu dipimpin Jusuf Kalla tersebut sudah menyelesaikan bangunan koalisinya dengan Hanura dengan memasang Jusuf Kalla-Wiranto sebagai pasangan capres-cawapres yang diusungnya. Dengan begitu, safari politik PKS ke PDIP dan Golkar lebih ditujukan untuk menarik perhatian SBY dan Partai Demokrat.

Strategi PKS untuk menaikkan daya tawar ke SBY dan Partai Demokrat yang demikian ini terbukti sukses. Perhatian pun akhirnya diberikan oleh SBY dan Partai Demokrat. Hal ini terbukti bahwa pada akhirnya, SBY dan Partai Demokrat membuka kembali pintu komunikasi kepada PKS yang sebelumnya mengancam untuk enyah dari "Koalisi Cikeas". Dalam hitungan jam sebelum acara deklarasi pasangan SBY-Boediono di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB Bandung pada tanggal 15 Mei 2009, pembicaraan kembali antara SBY dan PKS digelar. PKS pun akhirnya merapat kembali ke kubu SBY pada detik-detik akhir menjelang deklarasi. Tentu, tawar-menawar atau transaksi ulang dilakukan dan terjadi antara keduanya.

Menurut pemberitaan di media, PKS meminta kompensasi politik kepada SBY berupa pemberian jatah politik di kabinet, terutama di dua departemen penting bagi penyediaan sumber daya manusia, Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Hal ini dilakukan oleh PKS karena dalam keputusan akhirnya, SBY, alih-alih memilih calon yang diusungnya dari awal, menjatuhkan pilihan pada Boediono yang tidak memiliki afiliasi politik apapun kecuali sebagai figur profesional. Wakil Sekjen DPP PKS Zulkieflimansyah pun membantah: "Kalau bisa memilih, PKS tidak akan pilih menteri agama karena selama ini ada pertentangan di kalangan NU yang menganggap PKS merupakan ancaman bagi kalangan tradisional NU. Jadi, PKS tidak akan mengganggu posisi menteri agama."¹⁹ Bantahan PKS ini bisa jadi terkait dengan mengerasnya ketegangan politik antara dirinya dengan dua organisasi massa Islam besar, NU dan Muhammadiyah.

Politisasi Simbol dan Ritual Agama

Terlepas dari isi kesepakatan atau transaksi politik yang terjadi antara PKS dan kubu SBY-Partai Demokrat pada detik-detik menjelang deklarasi pasangan SBY-Boediono yang diusung oleh "Koalisi Cikeas", manuver politik PKS terhadap "Koalisi Cikeas" tidak berhenti sampai di situ. Pada satu sisi, sebagai bagian dari fatsun politik, PKS memiliki tanggung jawab politik sebagai bagian dari koalisi partai pengusung pasangan SBY-Boediono untuk bekerja keras mendulang suara dan memenangkan pasangan yang diusung. Minimal, PKS bertanggung jawab untuk tetap mengamankan besaran suara nasional yang diraih dalam Pemilihan Legislatif 2009 yang mencapai 7,88 persen untuk disumbangkan kepada pemenang pasangan SBY-Boediono. Pada sisi lain, PKS juga tetap melakukan manuver untuk menaikkan daya tawar politiknya kepada SBY beserta "Koalisi Cikeas" yang dibentuknya.

¹⁹ Seperti dikutip di "PKS Tak Akan Pilih Posisi Menteri Agama," *Kompas*, 25 Mei 2009.

Dalam konteks realisasi atas dua kepentingan tersebut, PKS, pada hematnya, bisa dianggap telah melakukan politisasi agama. Secara teoritis, garis demarkasi yang bisa dipakai untuk menjelaskan apakah sebuah pergerakan politik bisa dianggap sebagai bagian dari politisasi agama, baik simbol maupun ritual, ataukah tidak adalah keterkaitan secara dekat dan langsung antara simbol atau ritual agama dan realisasi semangat penciptaan kebijakan publik yang menjadi tanggung jawab politik. Minimnya, atau bahkan nihilnya, keterkaitan itu akan dengan segera menjatuhkan sebuah pergerakan politik yang dilakukan oleh sebuah partai atau pegiat politik kepada makna esensial dari politisasi agama.

Dalam konteks itu, dua kasus yang terkait dengan Pilpres 2009 di bawah ini sulit untuk menghindarkan PKS dari ilustrasi faktual atas kecenderungannya untuk melakukan politisasi agama. Pasalnya, sulit untuk dicarikan pembenaran atas argumentasi apapun untuk menghindarkan diri dari anggitan politisasi agama dimaksud kecuali menjadikan agama hanya sebagai legitimasi politik. Sulit dicarikan argumentasi pembenar bahwa kedua kasus di bawah ini dieksploitasi karena memiliki kedekatan yang tinggi dengan realisasi semangat penciptaan kebijakan publik. Kedua kasus di bawah ini terkait dengan simbol agama berupa jilbab dan ritual agama berupa umrah (haji kecil).

Kasus Jilbab Politik

Dalam Pilpres 2009, terdapat tiga pasang peserta yang terdaftar resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai capres-cawapres pada perhelatan politik dan demokrasi kali ini. Mereka adalah pasangan SBY-Boediono (yang diusung oleh PD, PKS, PKB, PPP, PAN dan sejumlah parta kecil), JK-Wiranto (Golkar dan Hanura), dan Mega-Prabowo (PDIP dan Gerindra serta sejumlah partai kecil). "Saling serang" segera tak terhindarkan begitu ketiga pasang itu tercatat sebagai capres-cawapres resmi. Kecenderungan itu terjadi dalam kerangka untuk meningkatkan nilai jual diri dan melemahkan nilai jual lawan.

Setelah program di bidang ekonomi dicoba dijual ke publik, jilbab sebagai sebuah simbol keberagamaan-keislaman cenderung menjadi komoditas yang dieksploitasi secara politik. Dalam sebuah kesempatan bertempat di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2009), Wakil Sekjen DPP PKS Zulkieflimansyah mengungkapkan bahwa banyak dari kader PKS yang lebih tertarik pada pasangan JK-Wiranto karena pesona jilbab istri Jusuf Kalla (Mufidah) dan istri Wiranto (Rugaiya Usman). Menurut Zulkieflimansyah, PKS sulit untuk menghindari fakta atas kecenderungan banyaknya kader yang dimiliki yang menaruh hati pada pasangan JK-Wiranto. Secara tegas, pada kesempatan itu, Zulkieflimansyah berujar, "Kalau mau jujur sebagian kader PKS hatinya masih mengarah pada JK-Wiranto karena alasan istri dari kedua pasangan ini sangat sederhana dan berjilbab."²⁰

Dalam kasus eksploitasi jilbab di atas, bukti yang dieksploitasi dirujukkan kepada simbol keislaman yang melekat pada diri isteri pasangan capres-cawapres, dan bukan pada diri pasangan capres-cawapres itu sendiri. Masing-masing isteri dari pasangan JK-Wiranto dalam faktanya memang mengenakan jilbab. Dalam realitasnya, pengenaan jilbab ini bukan sesuatu yang baru dalam praktik dan ekspresi keseharian keduanya. Citra sebagai Muslim taat, yang disimbolisasikan melalui pengenaan jilbab tersebut, dicoba diperkuat di hadapan

²⁰ Seperti dikutip di "Kader PKS yang Disiplin tidak Mungkin Membelot," website PKS Yogyakarta, 27 Mei 2009: <http://pks-jogja.org/detail.php?ID=1327&cat=Berita> (Diakses 1 Juli 2009).

publik. Bahkan, muncul kampanye informal “jilbab loro” (dua jilbab) sebagai gambaran atas ketaatan keluarga pasangan JK-Wiranto pada agama yang dianut. Karena itu, dalam kasus jilbab ini, “pertempuran” terutama antara JK-Wiranto dan SBY-Boediono menjadi pemicu utamanya.

Pasangan JK-Wiranto diekspose ke publik sebagai pasangan yang justeru kuat keislamannya dibandingkan pasangan SBY-Boediono. Di ujung yang lain, pasangan SBY-Boediono dicoba dipotret sebagai pasangan yang tidak mencerminkan keislaman yang taat. Peralnya, masing-masing isteri dari pasangan capres-cawapres ini (Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono), pada senyatanya, memang tidak berjilbab. Fakta ini dianggap sebagai faktor pelemah kekuatan politik. Tidak berhenti sampai di situ, fakta tersebut dicoba dieksploitasi untuk menjadi *warning* bagi pasangan ini agar elektabilitas politiknya tidak melemah di hadapan publik pemilih.

Ironisnya, justeru partai anggota koalisi pengusung SBY-Boediono yang mengawali menguatnya diskursus jilbab politik ini. PKS berada di baris depan. Lebih jauh lagi, PKS bahkan diberitakan sejumlah media telah mengusulkan agar istri pasangan SBY-Boediono segera mengenakan jilbab untuk mencitrakan diri sebagai pasangan yang kuat dan taat keislamannya.²¹ Tentu, ujungnya adalah mengamankan suara pemilih Muslim yang dicoba diderek melalui sentimen keagamaan dalam bentuk yang simbolis.

Pada Pemilu 1999, isu anti pemimpin perempuan menjadi obyek yang dieksploitasi untuk memasarkan “titik beda politik” untuk kepentingan memperlemah posisi elektabilitas Megawati.²² Isu itu awalnya memang meluncur kencang, tapi melemah sama sekali terutama setelah pembagian “kue politik” dinikmati bersama. Kini, sepuluh tahun berikutnya pada Pilpres 2009, isu anti pemimpin perempuan di atas cenderung tidak laku dijual ke publik. Peralnya, Megawati sebagai salah satu kontestan Pilpres 2009 telah pernah menjadi pemimpin negeri ini. Karena itu, eksploitasi isu anti pemimpin perempuan tidak lagi efektif menyusul sudah adanya preseden politik oleh kepresidenan Megawati sendiri di negeri ini. PKS tampak sangat menyadari sepenuhnya kondisi politik seperti ini, dan karena itu tidak menjadikan perempuan sebagai isu politik pada Pemilu 2009.

Sebagai gantinya, isu yang dieksploitasi pun bergeser. Alih-alih anti pemimpin perempuan, jilbab dianggap sangat tepat untuk dieksploitasi saat ini. Peralnya, tidak saja pasangan SBY-Boediono yang masing-masing isteri mereka memang tidak berjilbab akan menjadi obyek sasaran. Pasangan Megawati-Prabowo pun juga terkena imbasnya secara tidak langsung karena memang Megawati dalam sejarah dan praktik kesehariannya tidak berjilbab.

Dengan proses komodifikasi simbol Islam, jilbab kini telah bergeser meluas, dari sekadar bagian dari ekspresi keberagaman menjadi komoditas politik. Jilbab memang pada awalnya terkait erat dengan pola instrumentasi bagi perlindungan dan jaminan keamanan perempuan yang dikerangkai melalui doktrin agama.²³ Namun belakangan, jilbab telah menjadi komoditas

²¹ Lihat “Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono Disarankan Pakai Kerudung,” *Media Indonesia*, 26 Mei 2009.

²² Lebih lanjut mengenai reaksi kelompok Islam terhadap isu presiden perempuan, lihat Bernhard Platzdasch, “Islamic Reaction to a Female President,” in Chris Manning and Peter Van Diemen (eds.), *Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis* (Singapore: ISEAS, 2000), 336-349.

²³ Lihat diskusi mengenai jilbab dan pakaian wanita Muslim di Christian Joppke, *Veil: Mirror of Identity* (Cambridge; Malden: Polity, 2009); Mulhandy Ibn. Haj, Kusumayadi dan Amir Taufik, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab tentang Jilbab* (Bandung: Espe Press, 1998).

ekonomi bernilai jual mahal. Pilpres 2009 telah memperlebar isu jilbab tidak saja sebagai bagian dari ekspresi keagamaan dan komoditas ekonomi, tapi juga sebagai sebuah komoditas politik.

Kasus Umrah Politik

Agama tidak pernah bergeser dari posisinya sebagai ihwal besar dalam kontestasi politik di negeri ini, termasuk dalam Pilpres 2009. Isu agama kembali menyeruak ke permukaan sebagai faktor yang dianggap penting untuk dieksploitasi sedemikian rupa. Persisnya, identitas agama Boediono, cawapres SBY, menjadi sasaran kali ini. Boediono menjadi sasaran "serangan politik" dari rumor yang berhembus kencang di tengah masyarakat dengan tidak diketahui secara pasti siapa pelakunya. Ia digambarkan sebagai penganut Islam kejawaen, sebuah praktik keberagamaan Islam yang jauh dari nilai ortodoks. Ortodoksi sendiri merupakan anggitan dasar untuk menggambarkan ketaatan pada ajaran otentik agama.²⁴ Tudingan bahwa Boediono bukan penganut Islam yang taat dikarenakan oleh belum kunjungnya dia untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

Tudingan di atas tentu saja tidak menguntungkan bagi pasangan SBY-Boediono karena kelompok Muslim merupakan pasar politik yang sangat besar. Karena itu, kegundahan pun tidak bisa ditutupi oleh kubu pasangan SBY-Boediono. Saat kegundahan yang demikian ini menerpa, Presiden PKS kala itu, Tifatul Sembiring, dilaporkan tampil dan mengajak Boediono melalui tim sukses pasangan SBY-Boediono untuk melakukan umrah ke Mekkah, seraya berujar: "Udahlah ajak Boediono umrah, pesan tiket, nanti semua persoalan selesai."²⁵ Lebih lanjut, Tifatul juga menyatakan, "Saya memang akan ajak Boediono umrah. Oh iya sudah pesen tiket tanggal 5 Juli, pas hari tenang."²⁶

Ajakan PKS terhadap Boediono untuk melakukan umrah di atas semakin menemukan momentumnya saat mencuat rumor di publik secara meluas bahwa isteri Boediono, Herawati, seorang Katolik. Bahkan, pembicaraan mengenai status agama isteri Boediono ini semakin ramai di publik. Terutama saat kampanye Jusuf Kalla di gedung Madinatul Hujjah, Asrama Haji Medan, Sumatera Utara (Rabu, 24/6/2009), beredar selebaran yang menyebut-nyebut isteri Boediono sebagai perempuan non-muslim. Rumor itu bergerak liar, menyodok ke kanan dan ke kiri atas subyek yang menjadi sasarannya. Hasilnya, koalisi pengusung pasangan SBY-Boediono dibikin repot dan kelabakan oleh rumor itu. Karena itu, ajakan PKS kepada Boediono untuk melakukan umrah memiliki signifikansi politik yang tinggi untuk menegaskan keislaman Boediono dan isterinya.

Kasus [ajakan] umrah cawapres Boediono bersama PKS di atas mengingatkan kita kembali kepada kasus hajinya Presiden Soeharto pada awal 1990an yang lalu. Ritual haji itu dilakukan oleh Soeharto sebagai bagian untuk menaikkan daya tawar personal di hadapan publik Muslim. Penaikan daya tawar di hadapan Muslim ini dianggap penting oleh Soeharto menyusul fragmentasi kekuatan militer saat itu. Koalisi Soeharto dengan elemen penting dari sayap militer di bawah kendali Jenderal Benny Murdani pun sudah mulai retak. Soeharto

²⁴ Lebih lanjut mengenai konsep ortodoksi Islam, lihat Fauzan Saleh, *Modern Trends in Islamic Theological Discourse in 20th Century Indonesia: A Critical Study* (Leiden; Boston: Brill, 2001), 46-61.

²⁵ "Hanya untuk Memoles Citra: Umrah Politik PKS-Boediono," *Duta Masyarakat*, 22 Juni 2009.

²⁶ "Hanya untuk Memoles Citra."

melihat militer tidak lagi bisa dijadikan sebagai “penyokong utama” untuk kepentingan pelanggaran kuasa politiknya.²⁷

Soeharto pun lalu menghampiri kelompok Muslim sebagai entitas sosial mayoritas di negeri ini. Pendekatan ini tentu dimaksudkan untuk membentuk “perkawanan” baru bagi bancik politik kekuasaan Soeharto. Namun, untuk maksud itu, Soeharto harus menyadari bahwa banyak dari publik Muslim yang masih melihat bahwa dia dan isterinya, Tien, bukanlah Islam yang taat. Bahkan, lebih ekstrem lagi, sebagian mereka justru meyakini Soeharto dan Tien adalah pengikut setia kejawen.

Pergi haji merupakan strategi Soeharto kala itu untuk meyakinkan publik bahwa dia bersama keluarganya adalah Muslim yang taat. Bahkan, nama yang awalnya murni Jawa akhirnya bertambah dengan nama “Muhammad” sebagai penegas identitas keislamannya. Muncullah panggilan dan nama lengkap Haji Muhammad Soeharto, begitu ritual haji usai dilaksanakan.

Kasus [ajakan] umrahnya PKS-Boediono yang ramai diperbincangkan bisa dibilang mengulang sejarah lama Soeharto. Modus dan strateginya serupa. Saat Boediono dan atau pasangannya dipertanyakan keislaman oleh sebagian publik sebagaimana Soeharto dan Tien tempo dulu, dia dan PKS buru-buru merasa penting untuk menegaskan keislamannya melalui ritual umrah. Tentu, kalau saat itu adalah musim haji, PKS-Boediono juga akan melaksanakan ritual haji, sebagaimana yang pernah “diteladankan” oleh Soeharto. Namun, karena saat itu bukan musim haji, maka instrumen keagamaan yang bisa dimanfaatkan secara apik untuk kepentingan penegasan identitas keislaman adalah umrah.

Baik umrah PKS-Boediono maupun rumor soal identitas agama Herawati Boediono di atas, pada hakikatnya, merupakan sebuah bentuk politisasi agama untuk kepentingan perengkuhan kuasa politik. Agama telah dieksploitasi untuk menurunkan pamor politik kontestasi Pilpres pada satu sisi, dan menaikkan citra politik di sisi lainnya. Bagi kelompok pembuat rumor, “serangan” atas identitas agama isteri cawapres Boediono telah berarti menjadikan agama sebagai alat untuk meruntuhkan pamor dan elektabilitas politik Boediono. Sebaliknya, umrah PKS-Boediono memberikan sinyal telah terjadinya eksploitasi agama untuk menaikkan citra dan elektabilitas politik pasangan SBY ini.

Dua kecenderungan berbeda namun berdimensi eksploitasi agama yang sama di atas tentu menjadikan agama sebagai sekadar bancik politik semata. Keduanya tidak memberikan pelajaran yang baik atas relasi yang konstruktif antara agama dan politik kebijakan publik. Pasalnya, publik tidak diberikan teladan yang elok untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan nilai bagi penciptaan kebajikan bersama. Sebaliknya, politik pada akhirnya hanya bermuara pada perengkuhan kekuasaan, sedangkan agama tidak lebih sebagai alat semata.

Penutup

Jika saja Jean Baudrillard (1929-2007), seorang teoretisi kritis post-strukturalis Perancis, masih hidup dan berada di Indonesia dalam situasi politik seperti menjelang Pilpres

²⁷ Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability* (Boulder, Colorado: Westview Press, 2000), 162-193; Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2000), 128-166.

2009, dia pasti tidak akan perlu susah-susah untuk mencari validasi atas teorinya tentang *commodity signs* (pertanda komoditas). Karyanya berjudul *For a Critique of the Political Economy of the Sign*²⁸ memberikan pemahaman bahwa sebuah nilai intrinsik-simbolis bisa membuat dan meningkatkan harga “barang dagangan” (komoditas) dari sebuah obyek tertentu. Nilai komoditas ini berdimensi riil dan acap kali pula berharga mahal.

Dalam konteks politik Indonesia kontemporer, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk negeri ini tidak saja memiliki signifikansi ekonomi yang tinggi tapi juga signifikansi politik yang berdaya jual tinggi pula. Dalam konteks ini, simbol Islam mengalami proses yang disebut dengan komodifikasi. Proses komodifikasi ini tidak saja menjadikan sesuatu yang awalnya tidak mempunyai signifikansi ekonomi-politik menjadi bernilai, tapi juga membuat sesuatu yang telah mempunyai signifikansi ekonomi politik tertentu untuk lebih meningkat nilai signifikansinya. Sesuatu itu tidak saja berbentuk barang, tetapi bisa juga hanya sekadar simbol. Untuk kepentingan komodifikasi, simbol bisa dijual menjadi sebuah komoditas.

Perspektif Baudrillard di atas bisa kita bunyikan ulang untuk melihat hiruk-pikuk menjelang Pilpres 2009 ini. Namun demikian, Islamisme telah memperluas cakupan kerangka teoritis komodifikasi. Jika selama ini komodifikasi lebih berorientasi kepada akumulasi finansial melalui komersialisasi atas obyek tertentu, Islamisme telah mendorong lebih jauh komodifikasi itu untuk tidak saja berorientasi kepada kuasa ekonomi, akan tetapi juga bermuara pada perluasan kuasa politik. Bentuknya, komodifikasi model Islamisme tidak lagi berupa komersialisasi akan tetapi politisasi atas obyek, simbol dan atau ritual Islam untuk kepentingan perengkuan kuasa politik.

Pergerakan PKS pada Pilpres 2009 menjadi bukti pembenar atas politisasi simbol dan ritual agama oleh gerakan Islamisme. Nomenklatur kultural kegamaan, baik bersifat simbolik seperti jilbab maupun ritual seperti umrah, dicoba dieksploitasi untuk kepentingan kuasa politik model Islamisme di Indonesia. Karena itu, Islamisme, sebagaimana yang dipraktikkan oleh PKS pada Pilpres 2009, sangat dekat dengan politisasi agama dalam proses pergerakan untuk meraih kuasa politik.

Adakah kaitan langsung antara jilbab dan kapabilitas pengelolaan negara dalam konteks penciptaan kebijakan publik? Apa pula kaitan antara umrah dan kapabilitas penciptaan kebijakan publik yang semestinya dimiliki oleh calon pejabat publik? Dalam semangat yang terkandung dalam dua pertanyaan ini, eksploitasi atas jilbab dan umrah yang diuraikan di atas sulit dicarikan benang merahnya dengan kapabilitas untuk mengelola negara dan meramu kewenangan publik bagi penciptaan kebijakan bersama. Alih-alih, politisasi atas simbol dan ritual agama lebih mengemuka sebagai motif untuk mencapai kuasa politik. Dalam semangat ini, agama tak lebih menjadi komoditas politik untuk mendapatkan signifikansi bagi pemenangan kontestasi kekuasaan.

Watak dasar Islamisme yang menjadikan Islam sebagai basis ideologi gerakan politik tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan untuk mengesksploitasi agama dalam setiap momen dan pertarungan politik. Karena itu, Islamisme seperti yang dipraktikkan oleh PKS pada Pilpres 2009 bergerak sangat dekat sekali dengan politisasi agama. Dampaknya, tentu saja

²⁸ Jean Baudrillard, *For a Critique of the Political Economy of the Sign*, terj. Charles Levin (St. Louis: Telos Press, 1981).

agama cenderung tidak berdaya di hadapan kepentingan politik.

Menguatnya politisasi simbol dan ritual Islam, seperti dalam kasus jilbab dan umrah di atas, tidak akan terjadi jika pola keberagamaan publik tidak lagi bergerak di wilayah simbol. Kuatnya kecenderungan politisasi simbol Islam di atas terjadi dalam pertemuan di satu titik dengan kecenderungan keberagamaan publik yang menjadikan simbol sebagai bagian yang melekat dengan esensi. Mengharapkan enyahnya simbol dari ekspresi keberagamaan memang sama dengan mengharapkan berpisahnya dua sisi mata uang. Namun demikian, simbol tak boleh menihilkan esensi dan nilai dasar dari sebuah ajaran.

Politisasi simbol dan ritual agama dalam konteks sebuah pertarungan kuasa politik dilakukan sebagai modal untuk melakukan diferensiasi dan selanjutnya *positioning* serta segmentasi atas pasar politik yang dicoba untuk dimenangi. "Titik beda" itu merupakan hasil dari penguatan politik identitas.

Di negeri manapun, identitas memang selalu menjadi komoditas yang "diperjualbelikan" dalam setiap transaksi politik. Isu Obama pemeluk Islam sempat juga mencuat di negeri semaju dan semodern Amerika. Pemicunya adalah bahwa salah satu garis keluarga yang menjadi asal dia kebetulan beragama Islam. Isu itu dimunculkan tentu untuk memantik sentimen negatif publik Amerika yang mayoritas memang bukan Muslim, meskipun dalam kenyataannya upaya itu tidak membuahkan hasil.

Namun, yang terjadi pada Pilpres 2009 di Indonesia, identitas agama dalam ranah publik dieksploitasi oleh Islamisme PKS sedemikian rupa hingga harus melupakan esensi bahwa kemampuan untuk mengelola dan menciptakan kebajikan publik mestinya menjadi perhatian utama dalam penilaian politik atas kekuatan dan atau figur politik yang terlibat sebagai kontestan. Akibatnya, pengujian atas kapabilitas calon pemegang jabatan publik cenderung dihanyutkan oleh politisasi agama, baik simbol maupun ritual.

Daftar Rujukan

- "'Ilusi Negara Islam' Diperdebatkan, Gramedia Bantah Diancam." *Tempo*interaktif, 19 Mei 2009: <http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2009/05/19/brk,20090519-177189,id.html> (Diakses 19 Mei 2009).
- "Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono Disarankan Pakai Kerudung." *Media Indonesia*, 26 Mei 2009.
- "Hanya untuk Memoles Citra: Umrah Politik PKS-Boediono." *Duta Masyarakat*, 22 Juni 2009.
- "Kader PKS yang Disiplin tidak Mungkin Membelot." website PKS Yogyakarta, 27 Mei 2009: <http://pks-jogja.org/detail.php?ID=1327&cat=Berita> (Diakses 1 Juli 2009).
- "Pemilu Legislatif 2009; Perolehan Suara dan Kursi DPR," *Tokohindonesia.com*, 09/05/2009: <http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2009/07.shtml> (Diakses 30/06/2009)
- "PKS Tak Akan Pilih Posisi Menteri Agama." *Kompas*, 25 Mei 2009.
- "Visi dan Misi." website PKS: <http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=110> (Diakses 1 Juli 2009).
- Awwas, Irfan S. (ed.). *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*. Yogyakarta:

- Wihdah Press, 2001.
- Baudrillard, Jean. *For a Critique of the Political Economy of the Sign*. terj. Charles Levin. St. Louis: Telos Press, 1981.
- Bubalo, Anthony dan Greg Fealy. *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia*. Sydney: Lowy Institute, 2005.
- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. *Khittah Da'wah*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2001.
- Elson, RE. "Islam, Islamism, the Nation, and the Early Indonesian Nationalist Movement." *Journal of Indonesian Islam*, vol. 01, no. 02 (Desember 2007): 231-266.
- Haj, Mulhandy Ibn., Kusumayadi dan Amir Taufik. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab tentang Jilbab*. Bandung: Espe Press, 1998.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 2006.
- Husin, Asna. "Philosophical and Sociological Aspects of *Da'wah*: A Study of Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia." Disertasi PhD, Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University, 1998.
- Jahroni, Jajang. *Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam, 1998-2003*. Washington: University of Washington Press, 2008.
- Joppke, Christian. *Veil: Mirror of Identity*. Cambridge; Malden: Polity, 2009.
- Machmudi, Yon. "The Emergence of New *Santri* in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam*, vol. 02, no. 01 (Juni 2008): 69-102.
- Machmudi, Yon. *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party*. Canberra: ANU Press, 2008.
- Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*. cetakan 1. Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat PK S, 2008.
- Noor, Firman. "Moderate Islamic Fundamentalism: Understanding the Political Thinking of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS)." *Studia Islamika*, Vol. 14, No. 3 (2007), 447-481.
- Permata, Ahmad-Norma. "Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia, 1998-2006." Disertasi PhD, Graduate School of Politics, the University of Münster, Germany, 2008.
- Platzdasch, Bernhard. "Islamic Reaction to a Female President." in Chris Manning and Peter Van Diemen (eds.). *Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis*. Singapore: ISEAS, 2000. 336-349.
- Saleh, Fauzan. *Modern Trends in Islamic Theological Discourse in 20th Century Indonesia: A Critical Study*. Leiden; Boston: Brill, 2001.
- Schwarz, Adam. *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability*. Boulder, Colorado: Westview Press, 2000. Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2000.
- Trotter, Lydia. "Islam, Women and Indonesian Politics: The PKS challenge to Substantive Theories of Democracy." Tesis Honours, Department of Indonesian Studies, The University of Sydney, Australia, 2006.

Wahid, Abdurrahman (ed.). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Maarif, 2009.

Waluyo, Sapto. *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*. Bandung: Haraktuna Publishing, 2005.